

## STRATEGI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Fatmawati Sungkawaningrum

(Program Studi Ekonomi Syariah STAINU Temanggung)

Fatmawati2017ekn@gmail.com

### Abstract

This article discusses the strategy of realizing prosperity in the community, so that every community has a business and can be lifted from poverty. The method of writing this article uses descriptive analysis, which explains the strategy to realize social welfare through Islamic microfinance institutions. From the results of the discussion that Islamic microfinance institutions could be an alternative to overcome poverty in Indonesia. That is because many poor people in Indonesia are not accessed by formal banking. Microfinance institutions can facilitate providing loans, with easier conditions, encourage people to have business products, conduct training and program socialization that are both direct and indirect. The government's duty is to eradicate unfair economic policies, uneven distribution of assets, sanction corruptors. The government has issued various regulations for poverty alleviation. The alleviation of poverty and empowerment of the people who live mostly through MSMEs (micro, small and medium enterprises) has been hit with a fundamental problem, namely bank procedures that must be obeyed. Because banks must carry out the principle of prudence in releasing credit to customers. MSMEs, which are generally not in accordance with bank standards, have difficulties in obtaining access to credit. Then a pattern must be built. Alternative microfinance institutions that can be offered are the BMT (Baitul mall wa Tamwil) and savings and loan cooperatives. With the hope that a prosperous society can be realized.

**Keywords:** *Microfinance Institutions, Social Welfare, Government, Poverty Alleviation*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang strategi mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat, agar setiap masyarakat memiliki usaha dan bisa terangkat dari kemiskinan. Metode penulisan artikel ini menggunakan analisis deskriptif, yang menjelaskan tentang strategi mewujudkan kesejahteraan sosial melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dari hasil pembahasan bahwa lembaga keuangan mikro syariah bisa menjadi alternatif mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat miskin di Indonesia tidak terakses perbankan formal. Lembaga keuangan mikro dapat memfasilitasi memberikan pinjaman, dengan syarat yang lebih mudah, mendorong masyarakat memiliki produk usaha, melakukan pelatihan dan sosialisasi program yang bersifat langsung maupun tak langsung. Tugas pemerintah adalah memberantas kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset yang tidak merata, memberi sanksi pada koruptor. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat yang sebagian besar hidup melalui UMKM (usaha mikro kecil menengah) selama ini terbentur hal mendasar yaitu prosedur bank yang harus ditaati. Karena bank harus menjalankan azas kehati-hatian dalam melepas kredit pada nasabah. UMKM yang secara umum tidak sesuai standar bank, mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit. Maka sebuah pola harus dibangun. Alternatif lembaga keuangan mikro yang bisa ditawarkan adalah BMT (Baitul mall wa Tamwil) dan koperasi simpan pinjam. Dengan harapan masyarakat sejahtera bisa terwujud.

**Kata kunci:** Lembaga Keuangan Mikro, Kesejahteraan Sosial, Pemerintah, Pengentasan Kemiskinan

## **Pendahuluan**

Pembangunan merupakan usaha yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat untuk menuju situasi yang lebih baik. Masyarakat yang juga disebut sebagai sumberdaya manusia pada hakekatnya dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya manusia memiliki dimensi sebagai subyek dan sasaran pembangunan. Untuk mengelola sumber daya tersebut, dituntut untuk memiliki pengetahuan, terutama bagi perencana dan pelaku pembangunan sehingga memahami potensi sumber daya alam yang ada dan memahami berbagai permasalahannya.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan jumlah produksi perekonomian yang ditandai dengan adanya pendapatan nasional yang meningkat<sup>1</sup>. Informasi penting yang akan di kumpulkan adalah mengenai nilai barang dan jasa yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Suatu Negara dikatakan naik pertumbuhan ekonominya jika GNP mengalami peningkatan secara riil. Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Di berbagai negara selalu ada perbedaan penduduk secara ekonomi, sosial, budaya, politik, yang hal ini masih menjadi permasalahan suatu bangsa. Indonesia pernah dipimpin presiden secara silih berganti, dan masing-masing presiden memiliki program dan agenda pembangunan untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, namun kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih banyak dihadapi oleh warga Indonesia.

Hakekat pembangunan adalah manusia yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala

potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Hal ini akan memunculkan keberagaman dan spesialisasi sehingga ada transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggul sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan global. Transaksi merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala keberagaman dan kelebihanannya masing-masing. Hasil dari transaksi tersebut adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial terwujud melalui tercapainya kemakmuran yang berkeadilan.

Kokohnya bangunan kemakmuran di topang oleh kualitas dari tiga pilar yang melandasinya, yaitu pertumbuhan, stabilitas, efisiensi. Pilar pertama pertumbuhan merupakan sisi penawaran yang keberlangsungannya di tentukan oleh tiga faktor utama yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi<sup>3</sup>. Ketiga factor ini diolah sehingga bisa menggerakakan roda produksi. Mereka terdiri dari pengusaha kecil, menengah maupun besar. Bangunan usahanya bisa berupa koperasi, BMT (Baitul Mall Wa Tamwil), swasta maupun BUMN (Badan usaha milik Negara). Para pelakunya dikelompokkan ke dalam sektor tradisional dan sektor modern ataupun sektor informal dan sektor formal.

Dinamika pertumbuhan perekonomian bisa dilihat secara sektoral , ditelaah dari struktur produksi suatu perekonomian. Struktur produksi maupun komposisi para pelaku usaha selalu mengalami perubahan, sejalan dengan pergeseran dan komposisi faktor-faktor produksi. peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perubahan teknologi.

Peningkatan daya pertumbuhan membutuhkan suatu proses yang panjang. Oleh karena itulah perspektif pengembangan daya pertumbuhan selalu ditempatkan dalam kerangka jangka panjang. Untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Sadono,Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, hal 34

<sup>2</sup> Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, hal 35

---

<sup>3</sup> Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, Malang, INTIMEDIA, 2009, hal 37

pertumbuhan yang representative sebagai gambaran kemakmuran dengan menguatkan fundamental ekonomi yaitu menciptakan permintaan ekspor, dengan menghasilkan produksi yang unggulan, sehingga kompetitif secara global. Kebaragaman budaya, adat istiadat, agama, suku ras dan golongan merupakan asset ekonomi yang besarsecara potensial pariwisata. Jumlah penduduk yang banyak merupakan asset sumber daya manusia. Menjadi lebih produktif jika manusianya dibekali ide kreatif, inovatif, produktif, hemat dan efisien, sehingga tidak lagi menjadi rakyat yang menjadi beban ekonomi.

Pilar kedua dari kemakmuran adalah stabilitas ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dikelompokkan dalam suatu permintaan, diantaranya konsumsi swasta, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Variable-veriabel tersebut bisa dipengaruhi dalam kurun waktu yang relative cepat. Oleh karena itu sisi permintaan ini diperlukan dalam perspektif keseimbangan jangka pendek. Stabilitas ekonomi dipengaruhi secara intern ekonomi negara dan secara ekstren dipengaruhi ekonomi global. Apabila memiliki kekuatan fundamental eknomi intern kuat, maka dapat digunakan sebagai landasan modal dalam stabilitas ekonomi dan sebagai pertolongan pertama dalam guncangan krisis ekonomi global.

Pilar ketiga yaitu efisiensi, merupakan proses yang menentukan apakah proses interaksi antara penawaran dan permintaan berlangsung secara optimal. Agar ketiga pilar tersebut menghasilkan suatu bangunan ekonomi yang kokoh, dibutuhkan suatu arena kelembagaan yang memungkinkan seluruh elemen dari sisi penawaran dan sisi permintaan, dikelola dengan harmoni dalam segala pergerakan maka akan terjalin suatu efisiensi yang disampaikan oleh pasar. Pasar inilah yang merupakan arena kelembagaan. Semakin tinggi kepercayaan pada pasar maka semakin tinggi minat pasar dalam transaksi ekonomi dan investasi.

Krisis ekonomi membawa implikasi yang luas pada kehidupan ekonomi rakyat. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan fungsinya, dimana tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, pemberdayaan rakyat dan adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Otonomi daerah menjadi wacana tersendiri bagi masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang berharapan besar, bahwa dengan adanya otonomi daerah dapat mengentaskan berbagai krisis multidimensional Dampak dari otonomi daerah adalah adanya pergeseran perilaku yang dapat mengaburkan nilai-nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih dan *good governance*. Peran serta masyarakat terutama generasi muda sangat diperlukan untuk meredam berbagai isu negatif yang berupaya untuk membiaskan realita kemajuan program pembangunan pemerintah.

Indonesia memiliki sekitar 74 ribu desa. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 18% atau 18.126 desa masuk dalam kategori desa tertinggal.terbanyak di kawasan Indonesia Timur. Disebut tertinggal karena desa tersebut kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur dan aksesibilitas.

Berdasarkan paparan Bappenas, secara umum jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Penelitian ini di dasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qurratul A'yun Nailufarh, yang hasil penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat dan berkesinambungan seperti adanya UMKM diharapkan akan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Qurratul A'yun, Nailufarh, *Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di antara Harapan dan Realitas, Balance Economics, Bussines, Management*

Penelitian sebelumnya tentang lembaga keuangan adalah Agnetia Arumastuti yaitu lembaga keuangan telah berperan besar dalam pertumbuhan masyarakat industry modern. Tumpuan pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan sebagai tempat investasi melalui mekanisme *saving* atau menabung<sup>5</sup>

Banyak masyarakat Indonesia masih berpenghasilan rendah yang menyebabkan mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam kondisi kekurangan tersebut maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat merangkul dan meningkatkan taraf hidup terutama peningkatan perekonomian, yang bisa menstabilkan dan mengangkat kondisi perekonomian mereka. Lembaga seperti apa yang diperlukan, yang dekat dengan masyarakat tidak salah adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga tersebut adalah lembaga keuangan yang khusus memberikan pelayanan berupa jasa kepada mereka para pengusaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan bantuan. Bentuk bantuannya berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan simpanan.

## Metode Penulisan

Metode penulisan dalam makalah ini adalah metode analisis deskriptif. Penggunaan metode analisis deskriptif ini memungkinkan penulis menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu pemerintah dalam pembangunan, mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan para pelaku usaha, dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

---

*and Accounting Journal*, Th. VII, No 12 Jan 2010, hal 38

<sup>5</sup> Agnetia, Arumastuti, *Peran Produk Pembiayaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT "Akbar" Polokarto Sukoharjo*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal 4

## PEMBAHASAN

### Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25,95 juta orang, atau 9,82 % dari penduduk Indonesia.<sup>6</sup> Dari data tersebut tergolong masih banyak rakyat miskin di Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan atau kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, berupa sandang, pangan dan papan akibat keterbatasan dalam memperoleh akses, guna memenuhi kebutuhan pokoknya untuk melangsungkan kehidupan normal.<sup>7</sup> Pada dasarnya manusia memiliki hak hidup yang sama, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih, berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik serta pemenuhan kebutuhan normal lainnya.

Menjadi miskin bukanlah sesuatu yang diinginkan masyarakat. Manusia sudah semestinya mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhannya berupa makanan, minuman dan tempat tinggal<sup>8</sup>. Konsep pemberdayaan masyarakat miskin adalah berupaya, membantu dan menyadarkan bahwa permasalahan kemiskinan adalah permasalahan bersama yang menyakut seluruh aspek kehidupan. Masyarakat miskin membutuhkan pengakuan bahwa keadaan miskin adalah keterpaksaan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membantu, melepaskan belenggu kemiskinan.

Kondisi wilayah yang tidak dikelola dengan baik sebagai sumber mata pencaharian, dan masih tergantung pada sumber daya alam menyebabkan pendapatan masyarakat tidak menentu. Tidak adanya pendapatan tetap menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya beli makanan, minuman, pakaian, memperbaiki rumah,

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Persentase penduduk miskin Maret 2018*

<sup>7</sup> Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, hal 40

<sup>8</sup> Indra, Mahardika, *Pengantar Miko Ekonomi*, Jogjakarta , Quadrant, 2018, hal 31

mendapatkan pendidikan yang baik, menikmati fasilitas kesehatan.

### Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Penanggulangan kemiskinan dengan model pemberdayaan adalah strategi mewujudkan kesejahteraan social. Model pemberdayaan memberikan dampak lebih berdayasecara informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan, perubahan perilaku untuk mengurangi kemiskinan, serta adanya keterlibatan masyarakat miskin dalam pembangunan.

Pokok permasalahan kemiskinan sangat kompleks dari segi material dan dari segi non material. Kemiskinan dari segi material meliputi sandang, pangan, papan. Kemiskinan non material meliputi semangat dan etos kerja yang rendah, kurang akses informasi, kualitas sumber daya manusia rendah. Permasalahan kemiskinan ini tiap daerah berbeda-beda dan tiap daerah itu sendiri yang memahaminya. Apalagi ketika ditetapkan otonomi daerah untuk menjalankan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakter daerah masing- masing agar proses pembangunan bisa sampai kepada masyarakat miskin.

Strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Meningkatkan pendapatan yaitu melalui peningkatan produktifitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Mengurangi pengeluaran yaitu melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung dan mempermudah kegiatan social ekonomi.

Kebijakan strategi menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran ditempuh melalui 4 langkah yaitu *pertama*, perluasan kesempatan kerja, *kedua*, pemberdayaan masyarakat, *ketiga*, peningkatan

kemampuan sumberdaya manusia dan *keempat*, adalah perlindungan social<sup>9</sup>.

Untuk mengarahkan kebijakan makro dan mikro perlu dilakukan prioritas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

### Strategi LKM Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi yang berupaya mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi berdasarkan syariah.<sup>10</sup>

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sarana dan programnya adalah mendorong usaha kecil dan menengah melakukan aktifitas yang produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman. Untuk pemula pinjamannya kecil, ketika sudah terbukti mampu mengembalikan pinjaman bisa ditambahkan, sehingga bisa meningkatkan produktifitas di masyarakat pedesaan.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dan mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha mandiri dan mencetak para pengusaha. Mengembangkan usaha mikro dan pemberian kredit kepada para pengusaha. Usaha mikro terbukti mampu berdiri dan tidak mengalami keterpurukan ketika Indonesia mengalami krisis di tahun 1998 dan bahkan mempertahankan Indonesia dari keterpurukan.

<sup>9</sup> Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, hal 9

<sup>10</sup> Aam, S, Rusdiana, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia : Pendekatan Matriks Ifas Efas*, Jurnal ekonomi Isam Volume 9, Nomor 1, November 2018, hal 48

## **Inovasi LKM Syariah**

Inovasi lembaga keuangan mikro syariah menjadi strategi prioritas bagi perkoperasian syariah, dan BMT<sup>11</sup>. Inovasi memiliki peranan yang sangat penting dalam ketika menghadapi kompetisi. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan asset perbankan syariah, tetapi dilihat juga dampak apa yang ada pada masyarakat. Misalnya pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip keuangan syariah berfokus pada aktifitas ekonomi riil dan tidak hanya mengejar keuntungan semata. Tantangan dalam pengembangan keuangan syariah masih menjadi sesuatu yang harus dicari penyelesaiannya. Konsep ekonomi dan keuangan syariah telah mengakar dalam system keuangan global yaitu tentang kepatuhan terhadap syarat prakteknya harus sesuai dengan syariah.

Lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar<sup>12</sup>. Secara teknis bertujuan menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Sistem ekonomi syariah dapat menjadi solusi atas ketidakseimbangan ekonomi makro konvensional. Tujuan utamanya yaitu memberikan kontribusi menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan beradab. Paradigma yang harus dibangun pada lembaga keuangan syariah adalah kecakapan pemimpin. Untuk bisa berkembang

perlu melakukan inovasi pengembangan organisasi dan inovasi produk.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu lembaga keuangan formal, lembaga keuangan semi formal dan lembaga keuangan non formal. Contoh lembaga keuangan formal yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh BI (Bank Indonesia) seperti Bank Mandiri, BRI, Danamon serta BPR. Contoh lembaga keuangan semi formal yaitu lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya di luar perbankan seperti Pegadaian. Contoh lembaga keuangan non formal artinya tidak memiliki kerangka hukum yang jelas. Misalnya koperasi simpan pinjam, BMT, tetapi lembaga non formal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini terhalang sebuah pola yang paling mendasar di dunia perbankan yaitu syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Harus sesuai standar dalam perbankan adalah wajar, karena perbankan harus melaksanakan azas kehati-hatian.

Indonesia masih dihadapkan pada keterpurukan ekonomi yang disebabkan ketidak mampuan untuk menumbuhkan modal. Pinjaman untuk menambah modal diperlukan ketegasan kepemilikan asset. Lembaga keuangan belum menjangkau di daerah pedesaan yang secara memadai mampu memberikan alternative pelayanan produk jasa simpan pinjam yang kompetitif dengan kondisi social budaya serta kebutuhan ekonomi masyarakat desa menyebabkan konsep BMT dan Koperasi berbasis syariah hadir di daerah pedesaan.

Konsep BMT dan koperasi syariah merupakan konsep pengelolaan dana yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa. Jaminan sosial dapat mendorong proses pembangunan yang berupa insentif ekonomi, yaitu dalam konsep Islam berupa dana zakat, infaq

---

<sup>11</sup> Joko, Santosa, *Analisis Model Inovasi di BMT Muara Utama Kartasura dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 4

<sup>12</sup> Joko, Santosa, *Analisis Model Inovasi di BMT Muara Utama Kartasura dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 2

dan shodaqoh. Proteksi social ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berada atau berkecukupan. Dalam konsep BMT pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah yaitu bagi hasil. Konsep bagi hasil untuk masyarakat Indonesia merupakan konsep yang sudah lazim, dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan. Kelebihan konsep bagi hasil adalah adanya profit dan loss sharing (bagi hasil atau bagi rugi).

Lembaga keuangan mikro syariah memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan modal tambahan. Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Disamping ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga menyerap banyak tenaga kerja. Berperan pula dalam pendistribusian hasil pembangunan. Banyak usaha besar yang mengalami stagnasi dan bahkan berhenti aktifitasnya, karena adanya krisis global. Berbeda dengan UMKM yang terhitung lebih stabil bahkan tetap bisa bertahan dengan adanya krisis adalah karena di sebabkan UMKM umumnya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang merosot ketika krisis ekonomi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Bahkan UMKM masih bisa terus berproduksi dan menyerap tenaga kerja meskipun jumlahnya terbatas. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu sumberdaya manusia, modal, bahan baku sampai peralatan. Jadi sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang import.

Indonesia sering menghadapi krisis, sehingga berpengalaman dalam mengembangkan sektor swasta difokuskan pada UMKM. Yang menjadi permasalahan adalah UMKM ini masih berskala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit kerja lainnya yang lebih besar sehingga masih perlu untuk mendapatkan

perhatian lebih dari pemerintah atau masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah ke depan perlu meningkatkan peranannya dalam memberdayakan UMKM dan mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

### Perkembangan LKM Syariah di Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 membuktikan bahwa LKM syariah mampu bertahan dan bisa kokoh tetap berdiri tanpa terpengaruh krisis ekonomi global.<sup>13</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bisa dikatakan bahwa LKM syariah di Indonesia merupakan jantung perekonomian Indonesia. Perkembangan LKM ini sangat dipengaruhi para pelaku unit usaha mikro dan kecil yang populer di sebut usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Maka dari itu UMKM harus ditingkatkan dan ditumbuhkan agar dapat maju dan bisa bersaing dengan usaha besar lainnya. Inovasi teknologi bagi UMKM akan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk, dalam hal ini hubungan kemanusiaan yang terjalin dalam usaha kecil akan ditingkatkan lagi, sehingga terjalin sinergitas.

LKM memiliki kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak sehingga menyerap tenaga kerja yang tinggi, serta memiliki fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dan memiliki kemampuan manajerial yang dinamis. UMKM masih memiliki hambatan yaitu model akses keuangan yang lemah, keengganan bank dalam melayani sektor UMKM, citra

<sup>13</sup> Yuli, Suci, Rahmini, Perkembangan UMKM di Indonesia, Jurnal ilmiah Cano Ekonomos, vol 6, no. 1 Januari 2017, hal 51

buruk UMKM dimata bank, dan kurang pengetahuannya perbankan akan UMKM, tidak ada institusi penjamin kredit UMKM dan kurangnya asset sebagai jaminan kredit UMKM. Perlu campur tangan pemerintah untuk meyakinkan perbankan agar memberikan porsi yang cukup besar kepada sektor UMKM agar makin maju dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendanaan adalah hal penting, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru di tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang di harapkan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN yang peredaran produk barang dan jasa tidak lagi dibatasi batas Negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif dan sisi negative bagi UMKM. Menjadi positif apabila produk barang dan jasa yang di produksi UMKM dapat bersaing dengan produk barang dan jasa dari negrara-negara ASEAN lainnya. Dan menjadi negative jika sebaliknya. Maka dari itu penting bagi pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran.

### **Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

BMT merupakan salah satu industry jasa yang menawarkan produk sesuai kebutuhan syariah.<sup>14</sup> BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam, yang berlandaskan syariah<sup>15</sup> Selain itu, BMT juga dikatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan. Hal ini disebabkan BMT tidak hanya bergerak dalam

pengelolaan modal uang saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). BMT singkatan dari bait al-mal wat tamwil, bait al-mal artinya lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan Bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

Saat ini BMT banyak bermunculan di sekitar kita. Keberadaan BMT begitu mudah diterima masyarakat karena sifatnya yang mikro, dan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah dapat merasakan manfaat BMT. Awal kemunculan BMT kurang mendapat dukungan dari pemerintah, namun dengan kemandiriannya BMT mampu menunjukkan bahwa ia dapat berkembang dan bisa menjadi representasi dari koperasi modern.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT juga mendapat pandangan miring dari masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyaknya pemahaman yang tidak sesuai mengenai lembaga keuangan syariah, belum lengkapnya ketentuan operasional, instrument moneter, dan pasar keuangan yang mendukung. Banyak dijumpai ketidaksesuaian antara semangat syariah dengan praktek yang dilakukan, terbatasnya jumlah dan distribusi jaringan nasional, terbatasnya tenaga ahli yang mendukung pengembangannya.

Banyaknya lembaga keuangan yang tersebar ke berbagai pelosok desa rupanya belum mencapai kondisi yang ideal. Hal ini tercermin dari banyak lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target, pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar terabaikan. Khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat kelas bawah.

Namun realitas keberadaan BMT masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada. Masalah utamanya adalah factor kelembagaan yang sering menjadi kendala. Sampai saat ini kelembagaan BMT

<sup>14</sup> Joko, Santosa, *Analisis Model Inovasi di BMT Muara Utama Kartasura dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal 1

<sup>15</sup> Ahmad, Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Jogjakarta, ISES Publising, 2008, hal 80

belum diatur secara spesifik sebagaimana lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kebanyakan BMT saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya secara badan hukum BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian. BMT yang menyatakan dirinya sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan legalitas sebagai koperasi, seperti anggaran dasar, keanggotaan, permodalan, tata organisasi dan cara kerja lainnya. Sebagian praktisi BMT menganggap adopsi kelembagaan koperasi terhadap BMT mengingkari kenyataan sejarah, selain bertentangan dengan jatidiri gerak BMT di tanah air. Realitas lainnya berkenaan dengan pengawasan.

Beroperasinya BMT memang dibutuhkan oleh masyarakat, hanya saja pengawasan terhadap operasional BMT belum terumuskan dengan jelas. Meskipun telah dibentuk berbagai asosiasi BMT yang berperan dalam merumuskan standarisasi, advokasi, dan pengawasan, namun sampai saat ini belum mendapatkan legalitas yang memadai secara hukum nasional.

## Keunggulan BMT

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) secara harfiah berarti rumah dana dan rumah usaha<sup>16</sup>. Target operasionalnya focus pada sector UMKM. Keunggulan BMT ini adalah pengembangan harta kekayaan melalui usaha.<sup>17</sup> Pertama, secara filosofis BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan Al Quran dan Hadis. Kedua, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Ketiga, BMT langsung bersinggungan dengan masyarakat dan di desa-desa. Operasinya langsung ke jantung masyarakat miskin yang sulit

dilakukan oleh lembaga perbankan, karena cost-nya yang dianggap terlalu mahal. Keempat, BMT juga potensial sebagai alat pengentasan kemiskinan karena adanya perluasan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan.

## Simpulan

Strategi yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan beradab harus ditopang dengan 3 pilar utama yaitu kebebasan individu, tertib social dan pemerataan. Adapun untuk mewujudkan bangunan kemakmuran harus didukung pemerintahan yang bagus (*good governance*) yang berperan sebagai nahkoda yang handal dalam menjalankan sebuah kapal, juga sebagai regulator antara masyarakat miskin dengan lembaga keuangan mikro. Agar kemakmuran bisa terwujud diperbanyak pendapatan. Pendapatan diperoleh dari melakukan usaha dan berwiraswasta. Untuk memudahkan berwiraswasta diperlukan modal dana. Dana untuk usaha kecil menengah yang cocok adalah BMT, karena bisa memberikan prosedur peminjaman yang lebih longgar daripada perbankan besar dan lebih dekat dengan masyarakat.

Disamping itu BMT juga harus berbenah dan meyakinkan masyarakat bahwa operasional yang dilakukan BMT adalah sesuai syariat Islam. Aktif mensosialisasikan cara kerja BMT di masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan usaha dimana transaksinya secara syariah. Dalam mensosialisasikan dan menggerakkan perekonomian ini lembaga keuangan syariah juga perlu bantuan dari pemerintah, sehingga sinergi baik dan masyarakat sejahtera bisa segera terwujud.

## Daftar pustaka

Arumastuti, Agnetia, *Peran Produk Pembiayaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT "Akbar" Polokarto Sukoharjo*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

<sup>16</sup> Agnetia, Arumastuti, *Peran Produk Pembiayaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada BMT "Akbar" Polokarto Sukoharjo*, hal 5

<sup>17</sup> Muhamad, Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hal 15

- Ascarya, Ali Sakti, Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia, Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2017
- Budi, Sudjana, *Makro Ekonomi*, (Jogjakarta: expert), 2018
- Hasyim, Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro*, (Depok:Kharisma Putra Utama), 2017
- Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2016
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:RajaGrafindo persada), edisi ke-3, 2008.
- Karim, Adiwarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada), edisi ke-1, 2016
- Mahardika Indra, *Pengantar mikro Ekonomi*, (Jogjakarta : Quadrant), 2018
- Muhamad, *Ekonomi Moneter Islam*, (Jogjakarta: UII Pres), 2018
- Muhammad, Syafi' Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2011
- Nailufarh, Qurratul A'yun, *Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di antara Harapan dan Realitas, Balance Economics, Bussines, Management and Accounting Journal*, Th. VII, No 12 Jan 2010
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajawaliPers), 2016
- Santosa, Joko, *Analisis Model Inovasi di BMT Muara Utama Kartasura dalam meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, Artikel Ilmiah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Suci, Rahmini Yuli, *Perkembangan UMKM di Indonesia*, Jurnal ilmiah Cano Ekonomos, vol 6, no. 1 Januari 2017
- Sudarwati, Ninik, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang:INTIMEDIA), 2009
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Jogjakarta: ISES), 2008